

Sistem Informasi Pengajuan Nota Dinas (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan)

Aji Permana

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan, Indonesia

E-mail: aji@uniku.ac.id

Abstract

The process of financial management performance of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) and State Ministries/Institutions cannot be separated from planning, implementing, and controlling budget management. The process of making the RKA until the DIPA concept has been reviewed and approved by the Ministry of Finance c.q. The Directorate General of Treasury has been running well under the SKDP system, but the budget submission process (disbursement note), the realization of activities and the reporting process are not fully appropriate. This service note submission system can help manage in detail starting from the budget submission stage (notes), verification of submissions to the RKA, the approval process for the finance department and leadership and can manage reporting on the realization of activities carried out and manage budget details in the General Cash Book. so that the finance department and leadership can see the realized RKA process and can monitor the percentage of the budget used along with the remaining budget in each RKA in the unit/field

Keywords: Information System for Submission of Official Notes

Abstrak

Proses kinerja pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kementerian Negara/Lembaga tidak terlepas dengan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pengelolaan anggaran. Metode yang digunakan dalam penelitian inia adalah petode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. Hasil yaitu Proses pembuatan RKA sampai konsep DIPA yang telah ditelaah dan disahkan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah berjalan dengan baik secara sistem SKDP, namun proses pengajuan anggaran (nota pencairan), realisasi kegiatan serta proses pelaporan belum sepenuhnya sesuai. Sistem pengajuan nota dinas ini dapat membantu mengelola secara rinci mulai dari tahap pengajuan anggaran (nota), verifikasi pengajuan terhadap RKA, proses approval bagian keuangan dan pimpinan serta dapat mengelola pelaporan dari realisasi kegiatan yang dilakukan serta mengelola rincian anggaran dalam Buku Kas Umum agar bagian keuangan maupun pimpinan dapat melihat proses RKA yang direalisasikan serta dapat memantau prosentase anggaran yang digunakan berikut sisa anggaran yang ada pada masing-masing RKA pada unit/ bidang

Kata kunci: Sistem Informasi Pengajuan Nota Dinas

PENDAHULUAN

Proses pembuatan RKA sampai konsep DIPA yang telah ditelaah dan disahkan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah berjalan dengan baik secara sistem SKDP, namun proses pengajuan anggaran (nota pencairan), realisasi kegiatan serta proses pelaporan belum sepenuhnya sesuai. Beberapa kegiatan yang tertera dalam RKA yang telah dilakukan terkadang tidak memenuhi standar pelaporan bahkan beberapa kegiatan dalam RKA yang dilakukan belum direalisasikan namun pihak terkait melakukan pengajuan anggaran kembali terhadap RKA lain, sehingga proses pelaporan seringkali diabaikan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana rancangan sistem informasi dalam membuat laporan melalui sistem informasi pengajuan nota dinas?

METODE PENELITIAN

Adapun metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data.

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian adalah pengumpulan data karena berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan Wawancara (Interview), observasi, maupun Studi Pustaka.

a. Wawancara.

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang bertanggung jawab yaitu Kasubag Keuangan Bapak DEDEN RENDRA NR, SE.,M.Si.

b. Observasi

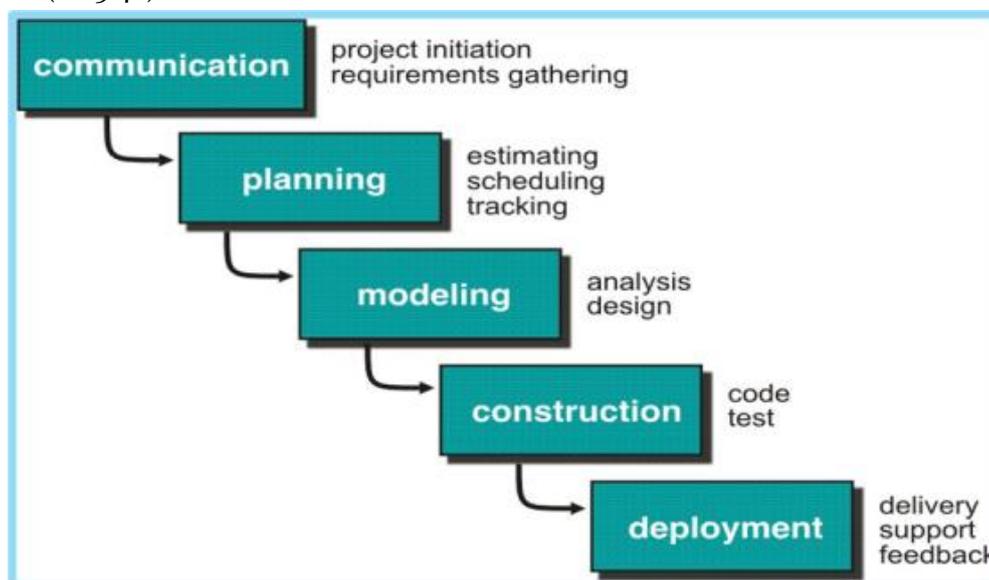
Observasi dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan dengan menganalisa dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam penelitian yang dilakukan.

c. Studi Pustaka.

Pada tahapan ini dilakukan dengan mencari literatur dan mencari informasi melalui media internet ataupun sumber lainnya yang memuat dan membahas tentang RKA, alur pengajuan nota dinas sampai pelaporannya.

2. Metodologi Pengembangan Sistem

Model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah "Linear Sequential Model". Model ini sering disebut juga dengan "classic life cycle" atau metode waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generic pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai dalam Software Engineering (SE). Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Pressman (2015:42). Fase-fase dalam Waterfall Model menurut referensi Pressman :



Gambar 1 Waterfall Pressman (Pressman, 2015:42)

- a. Communication (Project Initiation & Requirements Gathering), sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek, seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi software. Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, dan internet.
- b. Planning (Estimating, Scheduling, Tracking), tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko yang dapat terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan tracking proses pengerjaan sistem.
- c. Modeling (Analysis & Design), tahapan ini adalah tahap perancangan dan permodelan arsitektur sistem yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran besar dari apa yang akan dikerjakan. Karena menggunakan pendekatan pengembangan sistem terstruktur, maka desain sistem pada tahapan ini menggunakan tools sebagai berikut:
 - 1) Data Flow Diagram (DFD)
 - 2) Entity Relationship Diagram (ERD)
 - 3) Model Relasional
 - 4) Kamus Data
 - 5) Construction (Code & Test)
- d. Tahapan Construction, ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain menjadi kode atau bentuk/bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Pada tahapan ini desain perangkat lunak diterjemahkan ke dalam program. Adapun bahasa pemrograman dan database yang digunakan untuk membuat website ini adalah PHP dan MySQL. Setelah pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk nantinya diperbaiki. Pada tahap pengujian sistem ini menggunakan pengujian kotak hitam (black-box testing) dan pengujian kotak putih (white-box testing)
- e. Deployment (Delivery, Support, Feedback), tahapan Deployment merupakan tahapan implementasi software ke customer, pemeliharaan software secara berkala, perbaikan software, evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. (Pressman, 2015:17)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Masalah

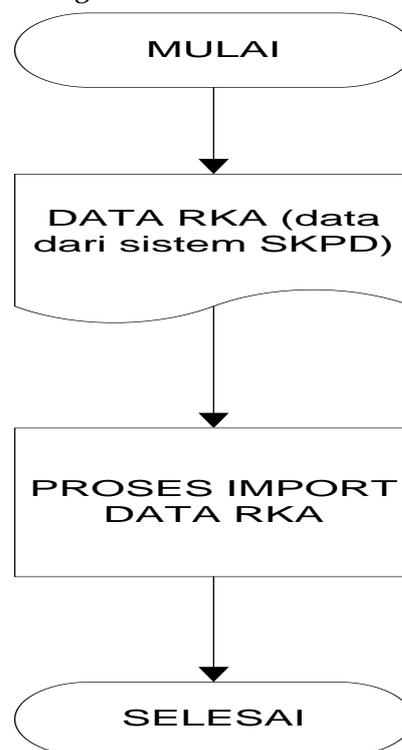
Analisis sistem yang berjalan pada Poliklinik Polres Kuningan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Proses pengajuan anggaran RKA dilakukan masing-masing bidang menggunakan nota manual sehingga pengecekan dan proses pencairan terkadang tidak sesuai dengan RKA.
- b. Persetujuan dilakukan secara manual yang mengakibatkan proses realisasi RKA tersendat.
- c. Proses pembayaran pajak yang sering ditemui kesalahan proses pembayaran pajak serta beberapa realisasi RKA (kena pajak) tidak dilakukan pembayaran pajak.
- d. Pelaporan dari realisasi RKA seringkali tidak dilakukan sehingga nilai dalam BKU (Buku Kas Umum) tidak sesuai dengan kondisi.
- e. Proses pengajuan anggaran yang tidak terkontrol sedangkan kegiatan lain masih dilakukan dan belum selesai.

B. Flowchart Sistem yang Diusulkan

Beberapa alur yang diusulkan seperti proses input kegiatan RKA, proses pengajuan anggaran dan permohonan kode billing DJP sebagai berikut :

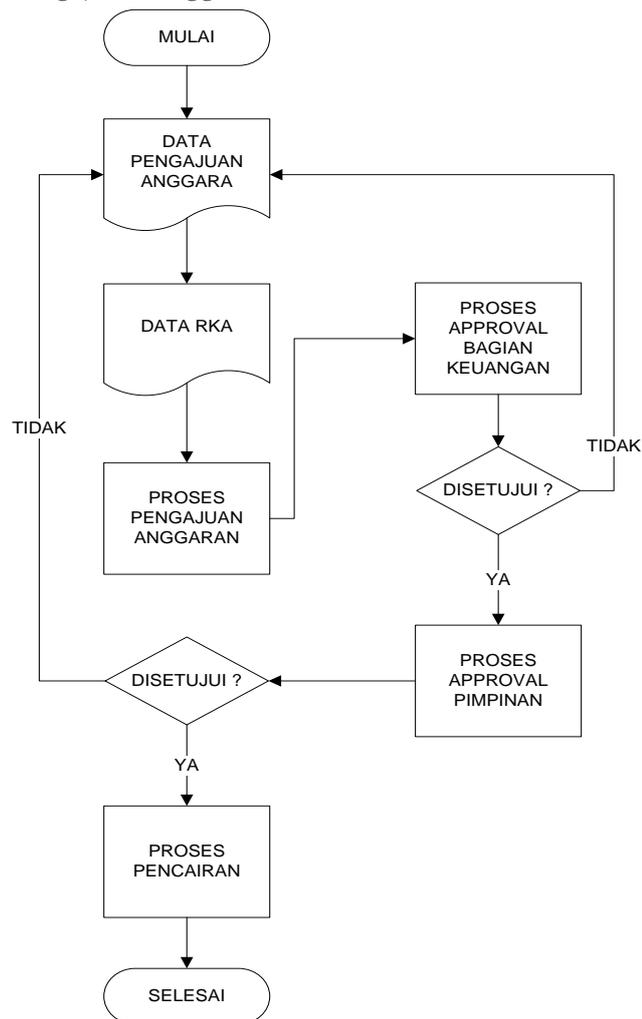
- a. Flowchart Proses Input Item Kegiatan RKA



Gambar 2 Flowchart Proses Input Item Kegiatan RKA

Bagian keuangan mengambil data dari sistem SKPD berupa data RKA pada masing-masing yang telah disetujui kemudian melakukan proses import ke sistem sebagai bahan dasar sistem.

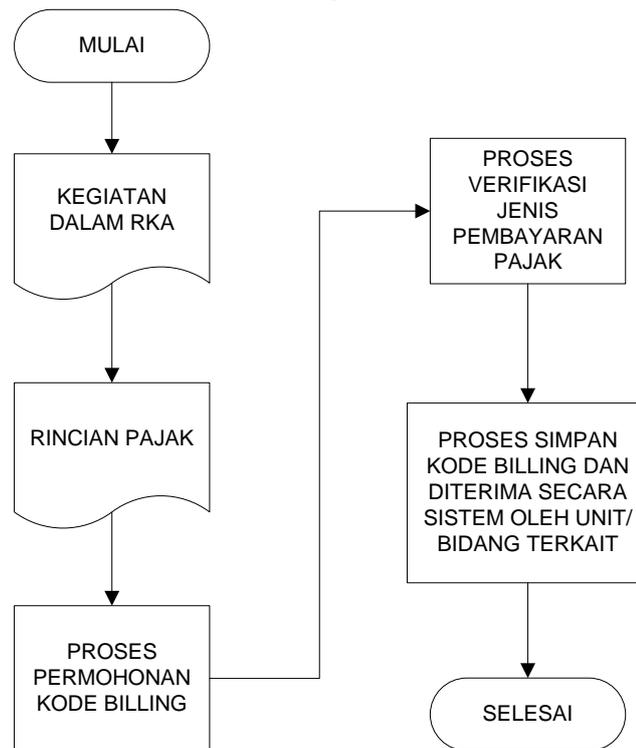
b. Flowchart Proses Pengajuan Anggaran



Gambar 3 Flowchart Proses Pengajuan Anggaran

Unit/ bidang melakukan proses pengajuan anggaran (nota) secara sistem dengan memilih data kegiatan yang akan atau sedang dilakukan. Bagian keuangan melakukan verifikasi pengajuan dan melakukan proses approval data pengajuan tersebut jika disetujui oleh bagian keuangan maka permohonan tersebut diteruskan kepada proses approval pimpinan dalam hal ini menjadi penentu pengajuan anggaran dapat diterima atau tidak untuk proses pengajuan pencairan. Jika pimpinan menyetujui maka akan dilakukan proses pencairan anggaran diteruskan oleh staf keuangan bagian pencairan anggaran. Disamping itu unit/ bidang terkait dapat melihat proses permohonan tersebut.

c. Flowchart Proses Permohonan Kode Billing DJP

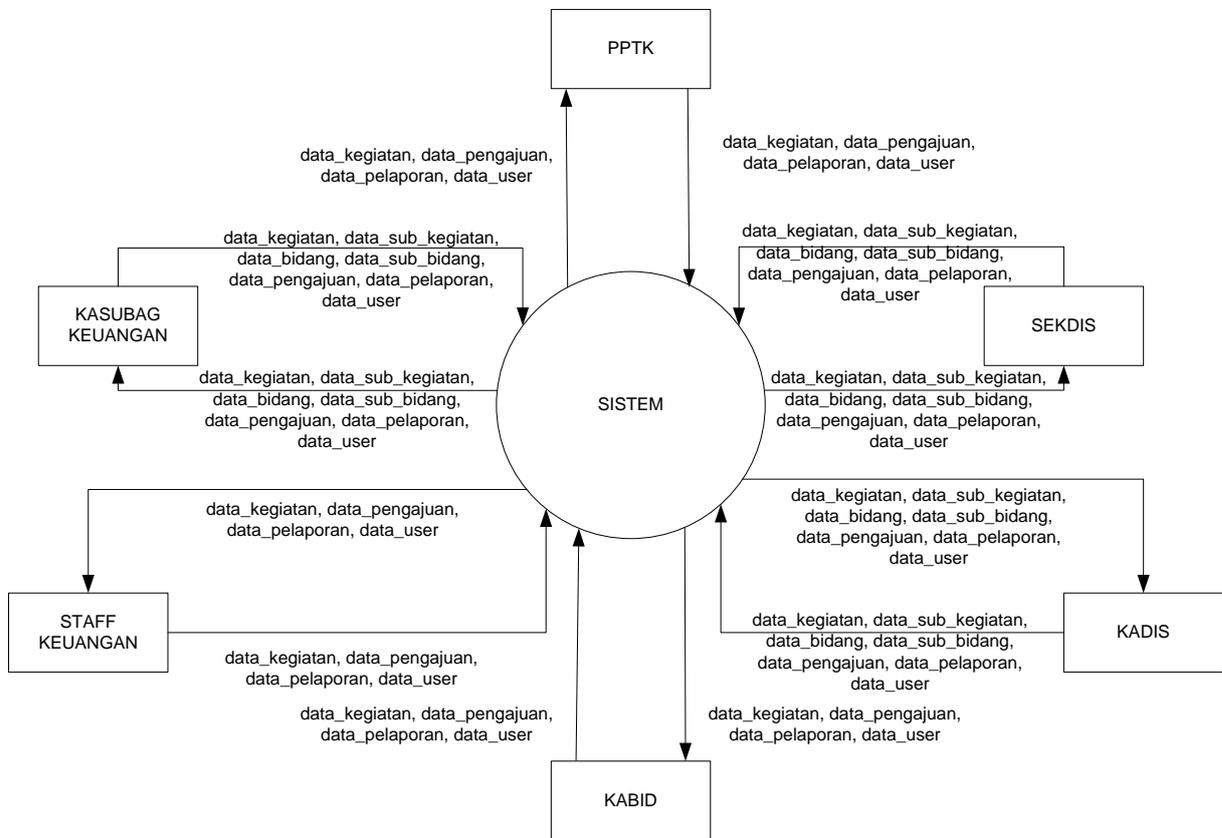


Gambar 4 Flowmap Proses Permohonan Kode Billing DJP

Proses permohonan kode biling dilakukan oleh unit/ bidang terkait dengan melengkapi data kegiatan dalam RKA serta rincian jenis pajak. Bagian keuangan melakukan verifikasi data permohonan dan menyesuaikan permohonan seperti nominal pembayaran pajak, jenis pajak yang digunakan dan data lainnya. Setelah data dirasa lengkap bagian keuangan menggunakan sistem DJP online untuk mendapatkan kode billing dan kemudian menginputkan file kode billing pada sistem dan diterima oleh unit/ bidang terkait

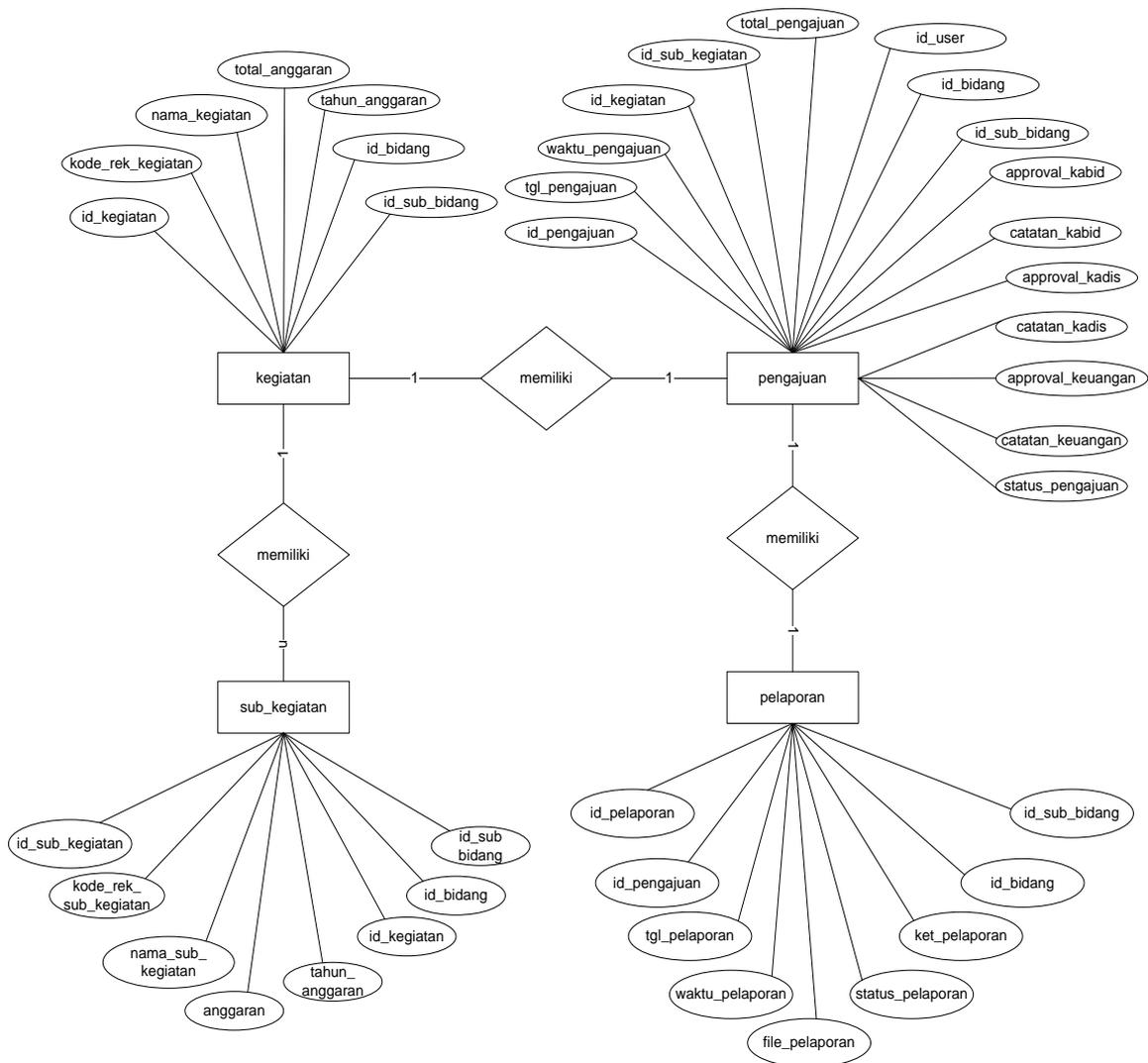
C. Diagram Konteks

Berikut adalah Diagram Konteks untuk menggambarkan hubungan antar entitas luar, masukan dan keluaran sistem, yang direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem informasi pengajuan nota dinas sebagai berikut :



Gambar 5 Diagram Konteks

E. Entity Relation Diagram (ERD)



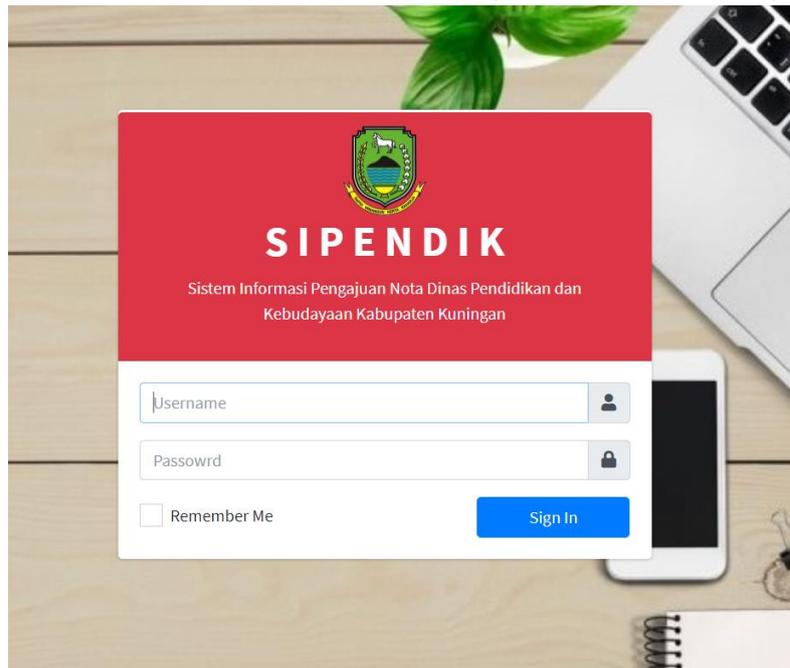
Gambar 7 ERD

Atribut :

- a. Kegiatan (id_kegiatan, kode_rek_kegiatan, nama_kegiatan, total_anggaran, tahun_anggaran, id_bidang, id_sub_bidang).
- b. Sub Kegiatan (id_sub_kegiatan, kode_rek_sub_kegiatan, nama_sub_kegiatan, anggaran, tahun_anggaran, id_kegiatan, id_bidang, id_sub_bidang)
- c. Pengajuan (id_pengajuan, tgl_pengajuan, waktu_pengajuan, id_kegiatan, id_sub_kegiatan, total_pengajuan, id_user, id_bidang, id_sub_bidang, approval_kabid, catatan_kabid, approval_kadis, catatan_kadis, approval_keuangan, catatan_keuangan, status_pengajuan)
- d. Pelaporan (id_pelaporan, id_pengajuan, tgl_pelaporan, waktu_pelaporan, file_pelaporan, status_pelaporan, ket_pelaporan, id_bidang, id_sub_bidang)

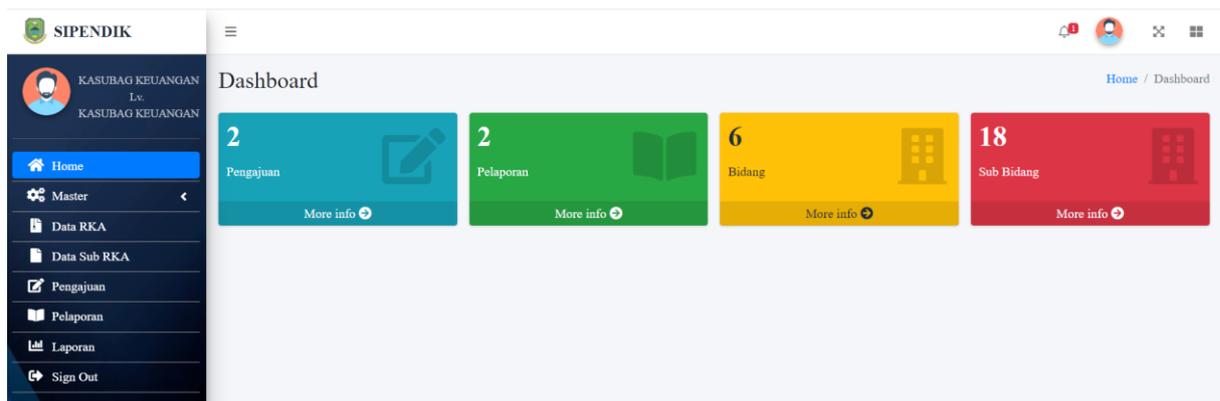
F. Implementasi

Berikut adalah hasil implementasi sistem pengajuan nota dinas yang telah dibuat.



Gambar 8 Tampilan Halaman Login

Halaman diatas digunakan untuk membatasi akses terhadap sistem dimana hanya pengguna yang memiliki akses yang dapat menggunakan Sistem tersebut.



Gambar 9 Tampilan Halaman Menu Dashboard

Halaman diatas adalah contoh pengguna dengan level Kasubag Keuangan halaman dashboar diatas digunakan untuk melihat data pengguna, pelaporan dan data lainnya secara cepat.

No	Tahun	Bidang	Sub Bidang	Kode Rek	Nama Kegiatan	Total Anggaran	Sisa Anggaran
1	2021	SEKRETARIAT	KEUANGAN	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah	771.575.037.330	771.175.037.330
2	2021	SEKRETARIAT	KEUANGAN	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	115.000.000	115.000.000
3	2021	SEKRETARIAT	KEUANGAN	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah	894.989.870	894.989.870
4	2021	SEKRETARIAT	KEUANGAN	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.000.000	110.000.000
5	2021	SEKRETARIAT	KEUANGAN	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.462.861.450	12.462.861.450

Gambar 10 Tampilan Halaman Data RKA

Halaman diatas digunakan untuk mengelola data RKA yang digunakan untuk mengelola data kegiatan pada masing-masing bidang dan sub bidangnya. Data RKA diinput oleh bagian PPTK yang kemudian dilakukan approval oleh KABID yang kemudian di proses oleh bagian keuangan.

No	Tahun	Bidang	Sub Bidang	Kode Rek Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Sisa Anggaran	Kode Rek Kegiatan
1	2021	SEKRETARIAT	KEUANGAN	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	770.815.037.897	770.815.037.897	1.01.01.2.02
2	2021	SEKRETARIAT	KEUANGAN	1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	759.999.433	359.999.433	1.01.01.2.02

Gambar 11 Tampilan Halaman Data Sub RKA

Halaman diatas adalah tampilan data sub RKA dimana pengelolaan rincian kegiatan dikelola pada halaman tersebut yang dikelola oleh masing-masing bidangnya oleh PPTK dan KABID.

No	Status	Approval & Catatan			Tanggal	Kegiatan	Total Rka	Sisa Rka	Sub Kegiatan
		Kabid	Kadis	Keuangan					
1	PROSES	-	-	-	03 Juli 2021	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah	771.575.037.330	771.575.037.330	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	DITERIMA	Y	Y	Y	03 Juli 2021	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	771.575.037.330	771.575.037.330	1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Gambar 12 Tampilan Halaman Pengajuan

Halaman pada menu Pengajuan digunakan untuk proses Pembuatan Nota Dinas (pengajuan anggaran kegiatan). Proses ini dilakukan oleh PPTK dengan pola Approval didalamnya dengan alur sebagai berikut :

1. PPTK melakukan pengajuan dengan menginput data pengajuan pada Menu Pengajuan
2. KABID/ SEKDIS (jika Sekretariat) melakukan pengecekan data pengajuan berdasarkan inputan yang dilakukan PPTK pada masing-masing sub bidangnya kemudian melakukan Approval (Menyetujui atau Tidak Menyetujui) pengajuan
3. KADIS mengecek semua data pengajuan dan menyatakan Approval (Menyetujui atau Tidak Menyetujui) pengajuan tersebut

KASUBAG KEUANGAN melakukan pengecekan Approval yang telah dilakukan oleh pimpinan dan kemudian menindaklanjuti data pengajuan tersebut dengan memberikan Status Pengajuan DITERIMA/ DITOLAK (Diperbaiki). Berikut hasil cetakan nota dinas beserta surat pernyataan yang dikeluarkan oleh sistem pengajuan nota dinas :

SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian serta hasil pembahasan yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan serta saran yang nantinya diharapkan berguna dan bermanfaat dalam penerapan Sistem Pengajuan Nota Dinas (Studi Kasus : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan). Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Telah dibuat suatu sistem sebagai solusi dalam pengajuan nota dinas pada masing-masing bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
2. Dengan dibangunnya sistem ini, pimpinan dapat melihat realisasi dana yang ada berikut melihat proses pelaporan realisasi anggaran yang sudah dilakukan.
3. Telah dibuat suatu sistem dalam membantu pengelolaan data RKA dan data pengajuan dana terhadap kegiatan pada masing-masing bidang dan sub bidang disertai history data yang akan terus tersimpan pada database sehingga data tersusun rapih dan dapat digunakan kembali ketika dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, Jogiyanto. 2005. Analisis & Desain Sistem Informasi. Yogyakarta : Andi Jusup, Al Irwansyah, Edy. 2014. Pengantar Teknologi Informasi. Penerbit Yogyakarta: Deepublish.
- Jogiyanto, 2010. Analisis dan Desain Sistem Informasi, Edisi IV, Andi Offset, Yogyakarta.
- Junindar. 2008. Panduan Lengkap Menjadi Programmer (Plus CD), Jakarta Selatan: Media Kita.
- Marlinda, Linda. 2004. Sistem Basis Data. Yogyakarta : Andi Offset.
- Roger, S. Pressman, Ph.D. , 2012, Rekayasa Perangkat Lunak (Pendekatan Praktisi) Edisi 7 : Buku 1 “, Yogyakarta: Andi.
- Shelly, Gary B., and Harry J. Rosenblatt. 2012. Systems Analysis and Design Nineth Edition. United States of America: Course Technology.
- Sri Mulyani. 2016. Metode Analisis dan Perancangan Sistem, Bandung : Abdi Sisematika.
- Yanto, Robi. 2016. Manajemen Basis Data Menggunakan MySQL. Yogyakarta : Deepublish.